

STRATEGI AMERIKA SERIKAT MEMBENDUNG DOMINASI TIONGKOK DI ASIA MELALUI INDO-PASIFIK

Agung Yudhistira Nugroho, Winta Br Pandia

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

wintabrpandia@gmail.com, [ajjn_agung@yahoo.com](mailto:aijn_agung@yahoo.com)

ABSTRAK

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump “*You Say Asia-Pasifik, I Say Indo-Pacific*” mengisyaratkan bagi perubahan konsentrasi geopolitik Amerika Serikat di Asia untuk meningkatkan pengaruh di kawasan. Langkah progresif yang ditempuh Amerika tertuang dalam konsep “*free open Indo-Pacific*” yang melibatkan beberapa negara di Asia sebagai *grand strategy* AS. Hadirnya negara aliansi Amerika Serikat atau sebutan dalam Indo-Pasifik, yaitu *The Quad* menegaskan keseriusan Amerika Serikat dalam menggarap konsep Indo-Pasifik. Indo-Pasifik yang diusung oleh Amerika Serikat bertujuan untuk membendung pengaruh dominasi Tiongkok setelah keluarnya Amerika Serikat dalam forum kerja sama *Trans Pacific Partnership* (TPP). Amerika membutuhkan ‘wadah’ baru untuk dapat kembali meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia dan konsep Indo-Pasifik adalah jawabannya. Indo-Pasifik Amerika Serikat yang mengedepankan kerja sama dan investasi disusun sebagai strategi utama dengan menggunakan konsep geopolitik dan geoekonomi. Amerika Serikat dalam Indo-Pasifik kembali menegaskan eksistensi sebagai kekuatan hegemon dibarengi dengan menggerakkan *the quad* sebagai kekuatan tambahan Amerika Serikat di kawasan. Peluang dan tantangan akan banyak dihadapi oleh Amerika Serikat dalam melaksanakan strategi tersebut, seperti halnya negara-negara yang tergabung dalam *the quad*, tidak dapat dibantah bahwasanya kepentingan yang ingin dicapai kedepannya akan berbeda. Di tambah dalam sistem internasional yang anarki ada istilah tidak ada “teman abadi”, melainkan kepentingan selamanya yang abadi.

Kata Kunci: Indo-Pasifik, Strategi, Amerika Serikat, Hegemoni, Investasi, Kerja sama

ABSTRACT

The statement of United States President Donald Trump "You Say Asia-Pacific, I Say Indo-Pacific" suggests for changes in the geopolitical concentration of the United States in Asia to increase influence in the region. The progressive steps taken by America are contained in the concept of "free open Indo-Pacific" which involves several countries in Asia as the US grand strategy. The presence of the United States alliance or the designation in the Indo-Pacific, namely The Quad emphasized the seriousness of the United States in working on the Indo-Pacific concept. The Indo-Pacific which is promoted by the United States aims to stem the influence of China domination after the United States' exit in the Trans Pacific Partnership (TPP) cooperation forum. America needs a new 'container' to be able to increase its influence in the Asian region and the Indo-Pacific concept is the answer. The Indo-Pacific United States which promotes cooperation and investment is prepared as the main strategy using the

concepts of geopolitics and geoeconomics. The United States in the Indo-Pacific again reaffirmed the existence of hegemonic power coupled with moving the quad as an additional strength of the United States in the region. Opportunities and challenges will be faced by the United States in implementing this strategy, as well as countries that are members of the quad, it cannot be denied that the interests to be achieved in the future will be different. In addition to the anarchic international system, there is the term that there is no "eternal friend", but eternal importance.

Keywords: Indo-Pacific, Strategy, United States, Hegemony, Investment, Cooperation

PENDAHULUAN

Ketidakpastian tatanan global dan tidak tetapnya kepentingan nasional tiap negara menjadikan kerja sama atau bahkan persaingan antar negara meningkat dalam tatanan dunia internasional. Menjalin kerja sama di kawasan dapat memberikan keuntungan sekaligus mempererat hubungan suatu negara dengan negara lain di kawasan guna mencapai kepentingan nasional masing-masing negara dan persaingan muncul sebagai dampak negatif dari kepentingan suatu negara. Kondisi geografis suatu wilayah tidak jarang memberikan keuntungan dan tidak jarang menimbulkan konflik di dalam wilayah apalagi negara tersebut berada dalam wilayah strategis yang dapat dimanfaatkan guna kemajuan ekonomi nasional. Terciptanya kawasan Indo-Pasifik tidak terlepas dari adanya perubahan kepentingan dan isu di kawasan maupun lingkup global. Kepentingan terbaru yang terbentuk di kawasan Indo-Pasifik--sebuah wilayah laut dan wilayah yang luas antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang berbatasan dengan Jepang, India dan Australia—memunculkan pertanyaan apakah akan menyaksikan terciptanya kelompok regional baru?

Amerika Serikat mulai fokus pada kawasan Indo-Pasifik dikarenakan ingin membendung pengaruh atau dominasi Tiongkok di Asia. Dalam hal ini, muncul beberapa pertanyaan, seperti apa yang menjadi kekhawatiran AS terhadap Tiongkok? Apakah Indo-Pasifik dibentuk karena ketakutan AS akan Tiongkok? Belum adanya jawaban pasti terkait hal tersebut, namun dapat dipastikan kepentingan AS di kawasan Indo-Pasifik untuk menekan pengaruh Tiongkok benar adanya, diperkuat dengan munculnya istilah *The Quads (Quadrilateral Security Dialogue)* kubu AS di Indo-

Pasifik yang memiliki kepentingan kurang lebih sama, yaitu ingin membendung dominasi Tiongkok di kawasan. Kekhawatiran AS akan kebangkitan Tiongkok ini cukup beralasan. Hal ini dapat ditelusuri melalui Buku Putih Pertahanan Tiongkok 2015, yang dalam hal ini untuk pertama kalinya, Tiongkok mengakui ambisinya atas lautan terbuka. Menurut pejabat militer Tiongkok, hal ini mencerminkan fakta bahwa *“Tiongkok has made it a strategic goal to become a maritime power, therefore, we need to build a strong navy (...) Offshore-waters defense alone can no longer provide effective defense of the country’s maritime interests.”* (Denyer, 2015). Buku Putih tersebut dapat dikatakan sebagai *“blueprint”* untuk meraih hegemoni regional secara perlahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Amerika Serikat Membendung Dominasi Tiongkok di Asia Melalui Indo-Pasifik”**.

KERANGKA TEORITIS

Konsep Geopolitik dan Geoekonomi

Pada 1919, Sir Halford Mackinder melengkapi tesis teritorial Mahan dengan mengajukan *“teori Heartland”*. Mackinder berpendapat bahwa negara yang mengontrol teritori antara Jerman dan Siberia dapat mengontrol dunia. Seperti diungkapkan dalam frase terkenal Mackinder : *“Who rules Eastern Europe commands the Heartland.. Who rules the Heartland commands the World Island..Who rules the World Island commands the World”* (Griffith, O’Callaghan & Roach, 2008, 123). Dalam perkembangannya, konsep geopolitik mengalami perubahan menjadi geoekonomi dengan fokus yang berubah dari gagasan militer menjadi fenomena ekonomi. Konsep ini berupaya menunjukkan bagaimana meraih dan mempertahankan keuntungan kompetitif nasional melalui alat atau cara ekonomi. Peperangan itu sendiri, tidak lebih merupakan alat utama untuk meraih tujuan yang sama. Jika satu negara memilih jalan perang, negara itu harus yakin bahwa jalan yang ditempuhnya akan mengarah pada peningkatan posisi ekonomi. Tidak seperti geopolitik, konsep geoekonomi lebih memfokuskan pada perkembangan sosial, yakni lebih berkaitan

dengan pertumbuhan ekonomi dan fenomena globalisasi (Soilen, 2012, 23). Konsep geopolitik dan geoekonomi ini digunakan untuk menjelaskan konsep Indo-Pasifik, yang beranggotakan Jepang, Korea Selatan, India dan Australia yang digunakan Amerika Serikat untuk membendung dominasi Tiongkok di Asia.

Teori Stabilitas Hegemoni

Konsep hegemoni oleh Hubert Vedrine serupa dengan makna hegemoni sebagai *hiper power*, akan tetapi Vedrine memperluas sudut pandang elemen-elemen pengukuran *power* negara hegemon. Elemen *power* hegemoni menurutnya terdiri dari: 1. *Power material*; ekonomi, militer, teknologi. 2. *Power immaterial*; sikap, konsep, bahasa, dan gaya hidup. Dalam hal ini, konsep hegemoni yang dibahas merupakan kekhawatiran atau merasa terancamnya Amerika Serikat akan kemajuan/bangkitnya perekonomian Tiongkok yang mungkin saja akan menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon saat ini. Tiongkok hadir dengan transformasi ekonomi yang luar biasa, yang semula ‘tertutup’ kini menjadi ‘terbuka’ akan adanya pasar bebas yang menjadikan kekuatan ekonomi Tiongkok menjadi kekuatan terbesar nomor 2(dua) setelah Amerika Serikat. Dengan kemajuan atau kekuatan perekonomian Tiongkok yang terbilang sangat cepat, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat dapat menggantikan posisi Amerika Serikat. Kondisi inilah yang menjadikan dan atau membuat Amerika Serikat mengatur strategi dalam menekan kekuatan Tiongkok khususnya di bidang ekonomi melalui Indo-Pasifik. Teori stabilitas hegemoni ini digunakan menjelaskan posisi AS sekarang ini selaku negara hegemon yang mampu memberikan *power* terciptanya tatanan regional baru (Indo-Pasifik) dan mampu mempengaruhi negara sekutunya untuk menjalankan suatu kerja sama dan juga perjanjian untuk mencapai kepentingan.

PEMBAHASAN

Pada tahun 2017 di Vietnam, Presiden Donald J. Trump menyatakan visi Amerika terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang di dalamnya semua negara berdaulat, kuat, dan makmur. Wakil Presiden Michael R. Pence menegaskan

kembali komitmen AS yang kuat dan berkelanjutan terhadap kawasan serta menyoroti kerja sama yang diperluas dengan mitra-mitra kami. Wakil Presiden memimpin delegasi AS menghadiri KTT regional yang utama dan pertemuan-pertemuan bilateral, didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri John Sullivan serta pejabat tinggi lainnya (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2018). Sebagaimana dicatat oleh Wakil Presiden, dinamika ekonomi Amerika mendorong kemakmuran di Indo-Pasifik dan di seluruh dunia. Tidak ada negara yang berinvestasi lebih banyak daripada Amerika Serikat di kawasan ini, yang pada saat ini mencapai senilai 940 miliar dolar AS dalam bentuk investasi asing secara langsung yang mendorong pertumbuhan di negara-negara Indo-Pasifik. Menurut data dari Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia tahun lalu pemerintah AS juga memberikan lebih dari 1,8 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan untuk kawasan ini. Pendekatan AS kepada Indo-Pasifik berfokus pada tiga bidang penting: ekonomi, tata pemerintahan, dan keamanan (U.S. Embassy Jakarta, 2018).

Amerika mengambil pendekatan pemerintah untuk memajukan perdagangan yang adil dan bertimbang balik, mempromosikan keterlibatan ekonomi dan perdagangan yang mematuhi standar-standar tinggi serta menghormati kedaulatan dan otonomi negara setempat, dan memobilisasi investasi sektor swasta di Indo-Pasifik. Selama kunjungan Wakil Presiden di kawasan itu, Amerika Serikat mengumumkan prakarsa dan kemitraan yang menempatkan Amerika Serikat dan kawasan ini pada arah jalan yang kuat untuk perluasan kerja sama pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut merupakan rancangan strategi yang peneliti dapat dari *website* Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia terkait Indo-Pasifik, yaitu:

1. Kemitraan untuk Kemakmuran

Wakil Presiden Pence menyoroti *BUILD Act*, yang ditandatangani Presiden Trump menjadi undang-undang pada bulan Oktober. Melalui undang-undang *BUILD Act* terbentuk sebuah Korporasi Pendanaan Pembangunan Internasional AS yang baru yang menggandakan kapasitas pendanaan pembangunan AS hingga senilai 60 miliar dolar AS. Perkembangan bersejarah ini akan menyulut lebih banyak peluang bagi

kemitraan di Indo-Pasifik. Melalui kerja sama dalam Kemitraan Energi Strategis Jepang-AS atau *Japan-U.S. Strategic Energy Partnership* (JUSEP) yang dibentuk tahun lalu, Amerika Serikat dan Jepang bermaksud untuk memfasilitasi investasi berstandar tinggi dalam proyek-proyek untuk memasok Gas Alam Cair (LNG) atau membangun infrastruktur LNG dengan menyelaraskan target pemerintah Jepang sebesar 10 miliar dolar AS dalam investasi publik dan swasta serta pelatihan pengembangan kapasitas melalui prakarsa Amerika Serikat untuk Peningkatan Pembangunan dan Pertumbuhan Asia melalui Energi atau *United States' Asia Enhancing Development and Growth through Energy* (Asia EDGE).

Korporasi Investasi Swasta Luar Negeri AS atau *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC), Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional atau *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC), dan Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia serta Korporasi Pendanaan dan Asuransi Ekspor atau *Export Finance and Insurance Corporation* (EFIC) menandatangani Nota Kesepahaman untuk memajukan kerja sama dalam memobilisasi investasi swasta di Indo-Pasifik. Pada tanggal 18 November, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Papua Nugini berencana untuk merilis pernyataan bersama yang menjabarkan kemitraan lima negara dengan tujuan mendukung Papua Nugini dalam memperluas akses listrik kepada 70 persen penduduknya pada tahun 2030. Pada KTT AS-ASEAN ke-6, Wakil Presiden mengumumkan Kemitraan Kota Cerdas AS-ASEAN baru yang akan membantu pemerintah kota memajukan transformasi digital sistem perkotaan dan meningkatkan keterlibatan perdagangan AS-ASEAN dalam ekonomi digital. Investasi awal Amerika Serikat dalam program ini adalah 10 juta dolar AS.

Wakil Presiden Pence dan Perdana Menteri Lee dari Singapura mengumumkan Nota Kesepahaman untuk mengembangkan kegiatan bersama dalam bidang-bidang penting seperti sektor infrastruktur, energi, teknologi keuangan, perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), dan memajukan kota cerdas melalui platform kerja sama perdagangan yang disempurnakan. Pada tanggal 15 November, para pejabat tinggi dari Amerika

Serikat, Australia, India, dan Jepang bertemu di Singapura untuk pembahasan ketiga mengenai Indo-Pasifik sejak November 2017.

2. Membangun Semangat dalam Energi, Infrastruktur, dan Ekonomi Digital

Wakil Presiden Pence dan Perdana Menteri Lee dari Singapura sepakat untuk mengeksplorasi cara-cara bagi Korporasi Pendanaan Pembangunan Internasional AS yang baru dan *Asia Infrastructure* dari Singapura yang belum lama ini diumumkan untuk bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan itu. Di bawah naungan Konektivitas Digital dan Kemitraan Keamanan Siber yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada musim panas ini, Wakil Presiden Pence dan Perdana Menteri Lee mengumumkan Program Bantuan Teknis Keamanan Siber AS-Singapura yang baru, yang akan memanfaatkan keahlian sektor swasta AS untuk meningkatkan keamanan siber di negara-negara anggota ASEAN. Wakil Presiden Pence menegaskan kembali dan memperkuat Kemitraan Strategis AS-ASEAN selama KTT AS-ASEAN pada tanggal 15 November 2018, saat diluncurkannya Pernyataan Bersama AS-ASEAN mengenai Keamanan Siber. Pada KTT Asia Timur, Amerika Serikat dan Republik Korea mensponsori bersama-sama sebuah pernyataan mengenai Penggunaan, Penyimpanan, dan Pengangkutan Bahan-Bahan Nuklir dan Radio Aktif Lainnya Secara Aman dan Selamat. Lembaga Perdagangan dan Pembangunan AS (*U.S. Trade and Development Agency*) menyetujui pendanaan untuk menyediakan bantuan teknis kepada Filipina untuk membantu menyebarkan Jaringan Pita Lebar Nasional (*National Broadband Network*) mereka dan meningkatkan adopsi sistem komputasi awan.

3. Menumbuhkan Kemitraan Ekonomi melalui APEC

Pada Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC, Amerika Serikat meluncurkan program bantuan teknis tahun ini dari program Dukungan AS bagi Pertumbuhan Ekonomi di Asia atau *U.S.-Support for Economic Growth in Asia (US-SEGA)*. US-SEGA, adalah program lima tahunan dengan setoran awal senilai 9 juta dolar AS dalam bentuk pendanaan AS, akan mengembangkan kapasitas dalam ekonomi APEC untuk mengadopsi standar yang tinggi, kebijakan perdagangan dan

investasi komprehensif yang mendorong perdagangan yang adil, pasar yang terbuka bagi kalangan bisnis AS, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh APEC dan kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat akan memajukan prioritas ekonomi AS pada Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC terkait dengan ekonomi digital, reformasi struktural, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perdagangan jasa.

4. Memperkuat Koneksi Orang-ke-Orang

Wakil Presiden Pence mengumumkan Pertemuan Tingkat Tinggi Prakarsa Pemimpin Muda Asia Tenggara atau *Young Southeast Asian Leaders Initiative* (YSEALI) 2018 yang akan diselenggarakan di Singapura pada tanggal 3-5 Desember 2018 untuk mengeksplorasi kemitraan AS-ASEAN bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Kunjungan Wakil Presiden dilandaskan pada kesuksesan tahun lalu dalam memperluas keterlibatan ekonomi antara Amerika Serikat dan Indo-Pasifik. Amerika Serikat memodernisasi hubungan perdagangan kami untuk menyesuaikan dengan realitas abad ke-21 dengan memperbarui Perjanjian Perdagangan Bebas Korea-AS (KORUS) dan mengumumkan niat kami untuk mengadakan negosiasi Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat-Jepang. Dalam Forum Bisnis Indo-Pasifik pada bulan Juli, Menteri Luar Negeri AS Michael R. Pompeo dan para pejabat Kabinet lainnya mengumumkan prakarsa ekonomi baru untuk memacu investasi swasta dalam sektor ekonomi digital, energi, dan infrastruktur.

Jaringan Transaksi dan Bantuan Infrastruktur meningkatkan upaya pemerintah AS untuk memajukan infrastruktur berkelanjutan di Indo-Pasifik. Asia EDGE (Peningkatan Pembangunan dan Pertumbuhan melalui Energi) memperkuat keamanan energi dan akses terhadap energi di seluruh Indo-Pasifik. Konektivitas Digital dan Kemitraan Keamanan Siber meningkatkan konektivitas digital mitra dan memperbesar peluang bagi ekspor teknologi AS. Menlu Pompeo juga mengumumkan perjanjian Korporasi Tantangan Milenium (*Millennium Challenge Corporation*) yang baru dengan Mongolia senilai 350 juta dolar AS, serta dukungan yang diperkuat bagi lembaga-lembaga regional penting: ASEAN, APEC, dan *Lower Mekong Initiative* (LMI), serta Asosiasi Rim Samudra Hindia atau *Indian Ocean Rim*

Association(IORA). Departemen Perdagangan memberikan status Otorisasi Perdagangan Strategis Peringkat 1 kepada India, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika mengekspor barang-barang berteknologi tinggi di bawah pengecualian lisensi yang disederhanakan. Departemen Perdagangan mengumumkan bahwa misi perdagangan terbesar mereka, *Trade Winds*, tahun ini didedikasikan untuk Indo-Pasifik, sebagai bagian Asia Akses – serangkaian 25 kegiatan untuk menghubungkan perusahaan-perusahaan Amerika dengan peluang-peluang di pasar Indo-Pasifik.

5. Memperjuangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Tatanan Masyarakat Sipil

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pilar inti dari visi AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik untuk menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk membuka peluang investasi swasta yang lebih besar, memerangi korupsi, mengamankan otonomi negara dari tekanan asing. Amerika Serikat akan terus mempromosikan transparansi, keterbukaan, aturan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan Amerika Serikat memiliki program yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang mendukung tujuan ini. Sebagaimana yang ditekankan oleh Wakil Presiden, investasi kami di bidang ini berjumlah lebih dari 400 juta dolar AS selama periode dua tahun. Pada tanggal 17 November 2018, Wakil Presiden mengumumkan Prakarsa Transparansi Indo-Pasifik yang akan mengarahkan investasi kami dalam ruang ini untuk memajukan tujuan bersama di kawasan ini. Prakarsa ini akan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang sehat, adil, dan responsif, melalui upaya-upaya untuk memerangi korupsi sambil mendorong tatanan masyarakat sipil yang kuat, peminjaman yang bertanggung jawab, praktik-praktik pengadaan dan kontrak yang jujur, dan reformasi sektor peradilan dan hukum, di antara tujuan-tujuan lainnya yang penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik.

Amerika Serikat bangga untuk berbagi tujuan-tujuan ini bersama para sekutu dan mitra kami, termasuk ASEAN, yang piagamnya menyerukan “arsitektur regional

yang terbuka, transparan, dan inklusif.” Prakarsa Transparansi Indo-Pasifik menyediakan platform yang lebih tinggi untuk mengembangkan kerjasama dengan sekutu, mitra, serta lembaga-lembaga regional kami untuk memajukan prinsip-prinsip bersama ini. Amerika Serikat akan berupaya untuk mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Indo-Pasifik, baik secara bilateral maupun melalui mekanisme regional termasuk ASEAN, APEC, Forum Kepulauan Pasifik, *Lower Mekong Initiative*, Prakarsa Teluk Bengali untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multisektoral, Asosiasi Rim Samudra Hindia.

6. Menjamin Tatanan Regional yang Damai dan Aman

Amerika Serikat menyediakan lebih dari setengah miliar dolar dalam bentuk bantuan keamanan kepada negara-negara Indo-Pasifik tahun ini—lebih dari dua kali lipat tahun sebelumnya. Ini termasuk yang diumumkan oleh Menlu Pompeo pada Forum Regional ASEAN pada bulan Agustus senilai hampir 300 juta dolar AS dalam bentuk bantuan untuk memperkuat keamanan maritim dan kesadaran akan batas wilayah kekuasaan, bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana (BK/TB), serta kemampuan pemeliharaan perdamaian, juga melawan kejahatan transnasional. Amerika Serikat juga memperluas kerja sama keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia, termasuk Prakarsa Teluk Bengali (*Bay of Bengal Initiative*) yang baru, dan memberikan keamanan maritim, serta program pemeliharaan perdamaian di Kepulauan Pasifik. Amerika Serikat sedang memperdalam kerja sama di seluruh Indo-Pasifik untuk menghadapi ancaman bersama, melindungi sumber daya-sumber daya bersama, dan menegaskan kedaulatan. Kami sedang bekerja bergandengan tangan dengan kawasan ini untuk mendenuklirisasi Korea Utara, melindungi hak dan kebebasan bernavigasi di Laut Cina Timur dan Selatan, serta mencegah penyebaran terorisme dan kekerasan ekstremisme. Keamanan dan kemakmuran Amerika bergantung pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan kami akan terus bekerja sama dengan negara mana pun, besar atau kecil, untuk memajukan visi tersebut sekarang serta untuk generasi yang akan datang.

Selama kunjungan Wakil Presiden, Amerika Serikat dan Jepang mengumumkan pengiriman sepuluh pesawat tempur F-35As tahun 2018, senilai 1,38 miliar dolar AS, di bawah program Penjualan Militer Asing kita, dengan enam lagi akan dikirim pada tahun 2019. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan Amerika menghasilkan senilai 9,42 miliar dolar AS dalam penjualan komersial secara langsung alat-alat dan jasa pertahanan di kawasan Indo-Pasifik selama tahun lalu. Wilayah Indo-Pasifik meliputi wilayah laut dan wilayah yang luas antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang berbatasan dengan Jepang, India, dan Australia. Signifikansi geopolitik di wilayah ini telah tumbuh sebagai akibat dari ketergantungan besar negara-negara pada rute lautnya untuk pengangkutan sumber daya energi dan barang perdagangan. Misalnya, Laut Tiongkok Selatan tidak hanya muncul sebagai salah satu jalur air perdagangan tersibuk di dunia, tetapi telah menjadi salah satu titik panas geopolitik yang paling kontroversial, mengadu klaim teritorial Tiongkok dengan penekanan dari Dialog Keamanan Segi Empat (*Quad*) untuk tatanan berdasarkan aturan.

Strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka Washington diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada akhir tahun 2017, dan mendorong New Delhi untuk peran penting di Indo-Pasifik. Visi kebebasan navigasi di perairan Pasifik dipromosikan untuk menantang penegakan kedaulatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Sebuah model pengembangan alternatif di kawasan Asia Tenggara dengan sumber daya baru, dipandang perlu untuk memutar kembali Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok (BRI). Walau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik memandang payung keamanan Amerika Serikat (AS) dengan kecurigaan, karena sumber daya dan komitmennya terhadap kawasan tersebut terus berfluktuasi pasca-9/11, namun Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berusaha untuk meredakan kekhawatiran ini dengan mengumumkan investasi senilai \$113 juta untuk inisiatif teknologi, energi, dan infrastruktur baru pada Juli tahun lalu. Ini diikuti oleh janji untuk menyediakan \$300 juta dana keamanan baru untuk wilayah tersebut pada bulan Agustus.

Wakil Presiden AS Mike Pence melakukan kunjungan ke Asia pada bulan November tahun lalu, yang termasuk mewakili Washington di KTT AS-ASEAN dan forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Presiden Barack Obama melewatkan pertemuan ini pada tahun 2013) serta kunjungan ke Australia, Jepang, Papua Nugini, dan Singapura untuk mempromosikan visi Amerika tentang kawasan Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”. Namun, kunjungannya dipandang dengan kecurigaan di Beijing dan mendorong Tiongkok untuk memperingatkan negara-negara eksternal agar tidak mengganggu rencananya untuk merancang kode etik untuk Laut Tiongkok Selatan. Pada tanggal 31 Desember tahun lalu, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang *Asia Reassurance Initiative Act* (ARIA) yang mengesahkan alokasi senilai \$1,5 miliar untuk mengembangkan “visi strategis jangka panjang dan kebijakan Amerika Serikat yang komprehensif, beraneka ragam, dan berprinsip untuk wilayah Indo-Pasifik, dan untuk tujuan lain” yang menunjukkan pergeseran fokus AS ke kawasan Indo-Pasifik, yang tampak lebih jelas dalam keengganan pemerintah untuk tetap terlibat secara militer dan membuang-buang sumber daya di Suriah dan Afghanistan.

Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi membuat Samudra Hindia sebagai prioritas strategis New Delhi sesaat setelah menjabat, dan kemudian mengunjungi Seychelles, Mauritius, dan Sri Lanka, serta beberapa negara Afrika Timur di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Dia mengundang Seychelles dan Mauritius untuk bergabung dengan pengaturan kerja sama keamanan maritim yang ada antara India, Maladewa, dan Sri Lanka pada tahun 2015, dan menekankan “masa depan untuk Samudra Hindia dengan nama SAGAR—*Security and Growth for All in the Region* (Keamanan dan Pertumbuhan untuk Semua di Kawasan).”

India, dalam upayanya untuk meningkatkan peran Pasifiknya, dan Jepang, yang bertujuan untuk memperluas perannya di Samudra Hindia, mengakhiri pertemuan puncak yang membuka jalan bagi pakta logistik militer yang akan memberi angkatan bersenjata masing-masing negara akses ke pangkalan-pangkalan lainnya. Para pemimpin kedua negara itu sepakat untuk memperkuat kerja sama angkatan laut dan

kerja sama keamanan laut, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek di negara ketiga, termasuk Myanmar, Bangladesh, dan Sri Lanka. Selain itu, kedua negara melakukan upaya untuk menonjolkan posisi mereka masing-masing dengan mencari lebih banyak keterlibatan dengan negara-negara Asia Tenggara. India mengartikulasikan kebijakan “*look to east*” untuk membina hubungan dekat di kawasan itu, sementara Jepang memberikan bantuan pembangunan untuk infrastruktur dan sumber daya manusia di seluruh kawasan, dan mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk menyalurkan investasi asing langsung ke ASEAN. Terlepas dari fokusnya pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe dipandang lebih sebagai strategi proaktif Jepang untuk mengurangi pengaruh Tiongkok.

KESIMPULAN

Kekhawatiran Amerika Serikat melihat kemajuan perekonomian Tiongkok yang dilihat sebagai ancaman karena dengan kekuatan ekonomi sekarang di posisikan sebagai kekuatan terbesar di Asia. Dengan posisi Tiongkok saat ini Amerika Serikat menyusun strategi dengan menghadirkan konsep baru, yaitu Indo-Pasifik sebagai pengganti Asia-Pasifik. Ditambah dengan aliansi yang dimiliki AS membantu membendung dominasi Tiongkok di Asia. Walaupun demikian, Amerika Serikat tidak terlepas dari tantangan guna melancarkan langkah strategisnya. Konsep *Free Open Indo-Pacific* yang diusung AS menjadi ‘boomerang’ bagi AS itu sendiri. Adanya tumpang-tindih kepentingan masing-masing negara serta beberapa negara pro Tiongkok yang tidak bisa lepas dari pengaruh Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, K. B. (2018). Memajukan Kawasan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.
- Krasner, M. C. (1989). *Hegemonic Stability Theory; An Empirical Assessment Review of International Studies, Vol. 15, No. 2, Special Issue on the Balance of Power.*
- Masitoh, D. (2018). *Upaya Pertahanan Hegemoni Amerika Serikat Menghadapi Dominasi Tiongkok.*
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murti, B. (2006). *Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan kualitatif di Bidang Kesehatan.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pettiford, J. S. (2009). *Hubungan internasional: Perspektif dan Tema.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Santoso, D. D. (2018). *Stabilitas Hegemoni Amerika Serikat Di Tengah Hadirnya Pengaruh Pasca Lahirnya Inisiasi One Belt One Road.*
- Sorensen, R. J. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- U.S. Embassy Jakarta. (2018, November). Memajukan Kawasan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.
- Dobell, Graeme;. (2018, Juni 5). *THE STRATEGIST.* Retrieved Maret 2, 2019, from [www.aspistrategist.org:https://www.aspistrategist.org.au/indo-pacific-versus-asia-pacific-as-makinder-faces-mahan/](https://www.aspistrategist.org/https://www.aspistrategist.org.au/indo-pacific-versus-asia-pacific-as-makinder-faces-mahan/) (diakses pada 2 Maret 2019)
- Jaipragas, Bhavan;. (2017, November 7). *THE WEEK IN ASIA.* Retrieved Maret 8, 2019, from [www.google.com:https://www.google.com/amp/s/amp.scmp.com/week-asia/politics/article/2118806/why-us-calling-asia-pacific-indo-pacific-trump-clarify](https://www.google.com/https://www.google.com/amp/s/amp.scmp.com/week-asia/politics/article/2118806/why-us-calling-asia-pacific-indo-pacific-trump-clarify) (diakses pada 8 Maret 2019)
- Medcalf, Rory;. (2015, Juni 26). *THE ASAN FORUM.* Retrieved Maret 13, 2019, from [www.theasan forum.org:http://www.theasanforum.org/reimagining-asia-from-asia-pacific-to-indo-pacific](http://www.theasanforum.org/reimagining-asia-from-asia-pacific-to-indo-pacific) (diakses pada 13 Maret 2019)
- Basu, T. (2016 , Mei 27). India's Approach towards Indo Pacific Triangularity, Institute for Defence Studies and Analyses. Retrieved from IDSA.id: <https://idsa.in/idsanews/indiasapproach-towards-indo-pacifictriangularity?q=print/> (diakses pada 14 Maret 2019)